

TAJUK KHUSUS

## Dampak Kebijakan Moneter *Higher for Longer* terhadap Perekonomian dan Fiskal Indonesia

(Arie Yanwar Kapriadi, Nararia Sanggrama Wijaya)

Konflik Rusia-Ukraina pada awal tahun 2022, menyebabkan terjadinya lonjakan harga komoditas global. Hal tersebut menyebabkan terjadinya disrupsi rantai supply yang berdampak pada meningkatnya harga komoditas global sehingga terjadi lonjakan inflasi *double digit* di beberapa negara, terutama di kawasan Eropa. Beberapa negara mencatatkan tingkat inflasi sangat tinggi di akhir 2022 seperti AS (9,1 persen), Inggris (11,1 persen), Turki (85,5 persen), dan Argentina (94,8 persen). Konflik Rusia-Ukraina yang berkepanjangan menyebabkan terjadinya persistensi tingkat inflasi dunia yang sangat tinggi yang di eskalasi dengan lambatnya pertumbuhan ekonomi global pascapandemi sehingga menyebabkan terjadinya stagflasi yang semakin memperparah kondisi perekonomian dunia. Hal ini mendorong bank sentral berbagai negara, merespons secara agresif guna mengendalikan tingkat inflasi dengan meningkatkan suku bunga tinggi dengan cepat. The Fed menaikkan suku bunga acuannya pertama kali pada Maret 2022 sementara ECB meninggalkan kebijakan 0% *interest rate ceiling*-nya dengan menaikkan suku bunga acuannya pada Juli 2022.

### Tingkat suku bunga *higher for longer* serta dampak terhadap kondisi domestik Indonesia

Sampai dengan akhir tahun 2023, The Fed menaikkan suku bunga acuannya sebanyak 11 kali sebesar 525 bps hingga mencapai 5,5% sedangkan ECB telah menaikkan suku bunga sebanyak 10 kali sebesar 450 bps hingga mencapai 4,5%. Kebijakan pengetatan moneter tersebut berhasil menahan lonjakan laju inflasi yang secara bertahap mengalami penurunan. Sampai dengan Oktober 2023, tingkat inflasi AS telah berada pada level 3,2%, dan kawasan Eropa mencapai 2,9%. Meskipun tingkat inflasi telah menurun, bank sentral negara-negara tersebut masih melihat risiko tingkat inflasi ke depan yang dapat lebih tinggi dari ekspektasi serta pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah dari harapan sehingga masih mempertahankan tingkat suku bunga acuan saat ini (*higher for longer*). Namun, kenaikan suku bunga acuan di samping bertujuan untuk mengatasi tekanan inflasi, di sisi lain juga memberikan dampak negatif berupa meningkatnya volatilitas pasar keuangan global, yang pada akhirnya juga berimbas ke negara-negara lain, termasuk Indonesia.

Secara langsung, setiap kebijakan moneter yang diambil oleh bank sentral negara-negara maju akan dimonitor dan direspons oleh Bank Indonesia dalam rangka stabilisasi sektor keuangan domestik. Dengan begitu, Bank Indonesia juga telah menaikkan suku bunga acuannya (BI 7 - *Day Reverse Repo Rate* / BI7DRR) sejak Agustus 2022 sebanyak 7 kali sebesar 250 bps dari 3,50% menjadi 6,00% pada November 2023. Dampak kenaikan suku bunga acuan global dan respons BI, tersebut terhadap perekonomian dan fiskal Indonesia dapat dilihat sebagai berikut:

#### α. Inflasi

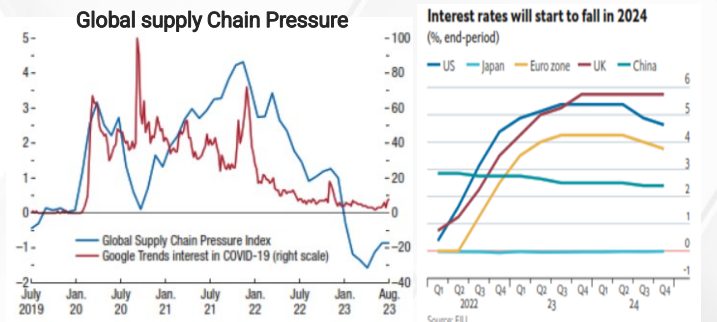
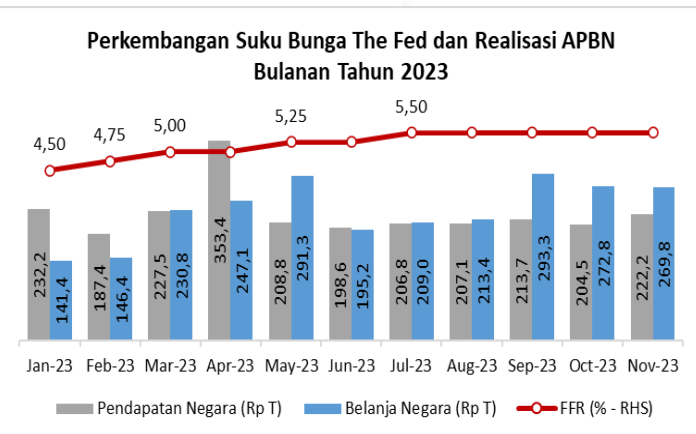
Rambatan kenaikan laju inflasi global juga dirasakan oleh Indonesia dengan terjadinya peningkatan inflasi dengan titik tertingginya sebesar 6,0% (yoy) pada

tersebut mendapat respons kebijakan moneter oleh BI yang berdampak terhadap semakin terkendalinya tingkat inflasi dan terus menunjukkan tren penurunan hingga mencapai 2,9% per November 2023,

- β. Nilai Tukar/Kurs Rupiah terhadap dolar AS  
Kenaikan suku bunga global meningkatkan risiko volatilitas di pasar keuangan global dan mendorong investor untuk mengalihkan investasinya kepada *safe haven asset*, seperti dolar AS. Hal ini menyebabkan apresiasi nilai tukar dolar terhadap mata uang negara dunia, termasuk rupiah. Depresiasi nilai tukar rupiah terlihat dari peningkatan rata-rata nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang mencapai rata-rata Rp15.233/US\$ hingga akhir November 2023 (ytd) dan bahkan rupiah sempat terdepresiasi sampai Rp15.946/US\$ pada 2 November 2023. Depresiasi nilai tukar rupiah yang terjadi di sepanjang tahun 2023 tersebut dapat memengaruhi persepsi investor atas kondisi perekonomian domestik.
- γ. Neraca Perdagangan  
Kinerja neraca perdagangan internasional Indonesia masih positif dengan mencatatkan surplus dalam 42 bulan berturut-turut hingga oktober 2023. Namun secara akumulatif, nilai surplus neraca perdagangan hingga Oktober 2023 hanya mencapai US\$31,2 miliar, menurun jika dibandingkan periode yang sama tahun 2022 yang mencapai US\$50,5 miliar. Kondisi ini menunjukkan bahwa telah terjadi penurunan permintaan di luar negeri akibat perlambatan pertumbuhan ekonomi dari negara mitra dagang Indonesia.
- δ. Neraca Modal  
Volatilitas pasar keuangan global menyebabkan terjadinya aliran modal keluar dari *emerging market*. Namun, respons kebijakan moneter BI yang mampu menjaga stabilitas fundamental makro ekonomi domestik, seperti tingkat inflasi yang menurun, serta pertumbuhan ekonomi yang tetap kuat, mampu menjaga tingkat kepercayaan investor terhadap perekonomian nasional. Hal ini terlihat dari aliran modal asing yang masih mencatatkan *net foreign buying* sebesar Rp57,8 triliun hingga November 2023.
- ε. Fiskal APBN  
Dari sisi fiskal, dampak kenaikan suku bunga acuan terhadap postur APBN secara langsung berpengaruh terhadap suku bunga SBN yang diterbitkan Pemerintah yang akan berpengaruh terhadap pembayaran bunga utang dalam APBN tahun berikutnya. Namun, APBN juga berfungsi sebagai *shock absorber* dari efek rambatan pelemahan ekonomi global dengan cara mengendalikan tingkat inflasi dan menjaga pertumbuhan ekonomi domestik. Peran APBN sebagai *shock absorber* antara lain dengan menyalurkan berbagai program perlindungan sosial, terutama terhadap masyarakat miskin dan rentan sehingga daya beli mereka dapat terjaga. Selain itu, melalui insentif perpajakan Pemerintah juga memberikan manfaat yang dirasakan secara menyeluruh oleh masyarakat dan berbagai aspek dalam perekonomian.

### Proyeksi ke depan

IMF dan Economist Intelligence dalam publikasi terakhirnya memberikan harapan terjadinya penurunan suku bunga ke depan. Dalam WEO Oktober 2023 disampaikan bahwa *global supply chain pressure index* telah mengalami penurunan yang memberi sinyal tingkat inflasi global dapat semakin terkendali dan menurun. Di sisi lain, Economist Intelligence dalam *Finance Outlook 2024* menyatakan bahwa meskipun suku bunga masih akan tinggi di tahun 2024, diperkirakan akan mulai mengalami penurunan di paruh kedua tahun 2024. Penurunan suku bunga tentunya akan memberikan dampak positif dengan kembali meningkatnya jumlah uang beredar di pasar. Pada akhirnya kegiatan investasi dapat kembali meningkat yang berperan besar memberikan *multiplier effect* kepada aktivitas perekonomian suatu negara.



Source: IMF

# Realisasi APBN

## S.d 30 November Tahun 2023

| Uraian<br>(triliun rupiah)    | 2022                                |         |                    | 2023                |               |                             |                        |                        |                        |
|-------------------------------|-------------------------------------|---------|--------------------|---------------------|---------------|-----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                               | Growth<br>s.d. 30 Nov<br>(y-o-y, %) | APBN    | Perpres<br>75/2023 | Real s.d.<br>30 Nov | % thd<br>APBN | % thd<br>Perpres<br>75/2023 | Growth<br>y-o-y<br>(%) | Growth<br>m-o-m<br>(%) | Growth<br>m-t-m<br>(%) |
| <b>A. PENDAPATAN NEGARA</b>   | ▲ 39,9                              | 2.463,0 | 2.637,2            | 2.462,4             | 100,0         | 93,4                        | ▲ 3,6                  | ▲ 12,1                 | ▲ 8,7                  |
| I. Penerimaan Perpajakan      | ▲ 40,6                              | 2.021,2 | 2.118,3            | 1.916,3             | 94,8          | 90,5                        | ▲ 3,6                  | ▲ 16,9                 | ▲ 6,6                  |
| 1. Penerimaan Pajak           | ▲ 44,9                              | 1.718,0 | 1.818,2            | 1.671,4             | 97,3          | 91,9                        | ▲ 6,5                  | ▲ 20,7                 | ▲ 8,6                  |
| 2. Kepabeanan & Cukai         | ▲ 20,7                              | 303,2   | 300,1              | 245,0               | 80,8          | 81,6                        | ▼ (12,6)               | ▼ (2,0)                | ▼ (4,6)                |
| II. PNPB                      | ▲ 37,8                              | 441,4   | 515,8              | 544,2               | 123,3         | 105,5                       | ▲ 3,2                  | ▼ (1,5)                | ▲ 17,3                 |
| III. Hibah                    | ▼ (42,5)                            | 0,4     | 3,1                | 1,8                 | 445,3         | 58,8                        | ▲ 54,5                 | ▼ (20,3)               | ▼ (28,0)               |
| <b>B. BELANJA NEGARA</b>      | ▲ 13,1                              | 3.061,2 | 3.117,2            | 2.510,5             | 82,0          | 80,5                        | ▼ (4,0)                | ▲ 2,5                  | ▼ (1,1)                |
| I. Belanja Pemerintah Pusat   | ▲ 17,7                              | 2.246,5 | 2.302,5            | 1.774,4             | 79,0          | 77,1                        | ▼ (5,7)                | ▼ (4,1)                | ▲ 15,3                 |
| 1. Belanja K/L                | ▼ (6,3)                             | 1.000,8 | 1.000,8            | 890,2               | 88,9          | 88,9                        | ▲ 1,4                  | ▼ (1,8)                | ▲ 22,6                 |
| 2. Belanja non-K/L            | ▲ 51,7                              | 1.245,6 | 1.301,6            | 884,3               | 71,0          | 67,9                        | ▼ (12,0)               | ▼ (7,3)                | ▲ 5,9                  |
| II. Transfer Ke Daerah        | ▲ 2,9                               | 814,7   | 814,7              | 736,1               | 90,4          | 90,4                        | ▲ 0,6                  | ▲ 28,7                 | ▼ (30,7)               |
| <b>C. KESEIMBANGAN PRIMER</b> | ▲ 144,9                             | (156,8) | (38,5)             | 361,1               | (230,4)       | (937,2)                     | ▲ 185,7                | ▼ (76,3)               | ▼ (82,5)               |
| <b>D. SURPLUS/(DEFISIT)</b>   | ▲ 61,3                              | (598,2) | (479,9)            | (48,2)              | 8,1           | 10,0                        | ▼ (79,6)               | ▼ (26,9)               | ▼ (30,5)               |
| <b>% thd PDB</b>              |                                     | (2,84)  | (2,27)             | (0,23)              |               |                             |                        |                        |                        |
| <b>E. PEMBIAYAAN ANGGARAN</b> | ▼ (26,8)                            | 598,2   | 479,9              | 282,3               | 47,2          | 58,8                        | ▼ (36,2)               | ▲ 8.865,3              | ▲ 1.960,1              |
| <b>SiLPA/(SiKPA)</b>          |                                     |         |                    | 234,1               |               |                             |                        |                        |                        |

### Leading Indicators yang Berpengaruh terhadap Postur APBN

Di tengah risiko ketidakpastian perekonomian global, kondisi perekonomian domestik pada bulan November 2023 relatif masih terjaga. Hal ini terlihat dari tingkat konsumsi domestik yang tetap menguat, tercermin dari IKK dan IPR yang tetap berada di zona optimis, serta didukung oleh laju inflasi yang terkendali. Dari sisi supply, sektor produksi domestik juga masih mencatatkan kinerja positif dengan PMI manufaktur yang berada di zona ekspansif dalam 27 bulan berturut-turut. Sementara itu, tekanan volatilitas pasar keuangan mulai mereda, dengan nilai tukar rupiah yang mencatatkan apresiasi dibandingkan bulan sebelumnya dan suku bunga SBN 10 tahun yang menurun. Dari sisi eksternal, harga komoditas minyak dunia mengalami penurunan yang cukup tajam di bulan November 2023. Penurunan harga minyak terutama dipengaruhi antara lain oleh peningkatan produksi minyak dari Norwegia, AS, dan Brazil, serta perkiraan penurunan permintaan akibat penurunan pertumbuhan ekonomi, terutama di kawasan eropa. Di sisi lain, harga komoditas ekspor utama Indonesia lain, seperti batubara dan CPO mengalami kenaikan. Harga batubara acuan (HBA) November mengalami kenaikan setelah tiga bulan sebelumnya mengalami penurunan, terutama dipengaruhi oleh peningkatan permintaan dari India serta kondisi cuaca yang tidak menentu yang memengaruhi produksi batubara. Sementara itu, harga referensi CPO mengalami kenaikan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain yaitu terdapat proyeksi penurunan produksi kelapa sawit di Indonesia dan adanya peningkatan permintaan minyak nabati dari Tiongkok sebagai negara konsumen utama produk CPO beserta turunannya.

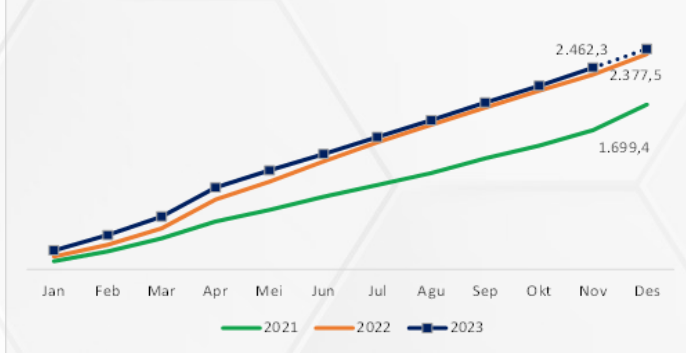
| SEKTOR RIIL                  | Nov-23 | mtm (%)     | yoy (%)     | Pengaruh  |
|------------------------------|--------|-------------|-------------|---|
| 1. Inflasi (% , ytd)         | 2,19   | ▲ 0,38      | ▲ 2,86      | • PPh<br>• PPN<br>• PNPB K/L  |
| 2. Indeks Penjualan Riil     | 209,4  | ▲ 0,9       | ▲ 2,9       | • PPh<br>• PPN<br>• Cukai   |
| 3. Indeks Keyakinan Konsumen | 123,6  | ▼ 0,7 poin  | ▲ 4,5 poin  | • PPh<br>• PPN<br>• Cukai   |
| 4. PMI Manufaktur Indonesia  | 51,7   | ▲ 0,2 poin  | ▲ 1,4 poin  | • PPN<br>• PPh<br>• PNPB SDA  |
| SEKTOR MONETER               | Nov-23 | Mtm (%)     | Yoy (%)     | Pengaruh  |
| 1. Nilai Tukar (Rp/US\$)     | 15.617 | ▲ 0,8       | ▲ 0,3       | • Perpajakan<br>• PNPB SDA<br>• Subsidi dan Kompensasi                        |
| 2. Yield SBN-10 Thn (%)      | 6,85   | ▼ 0,14 poin | ▼ 0,57 poin | • Belanja Bunga Utang<br>• Pembiayaan Anggaran (Utang)                        |
| SEKTOR EKSTERNAL             | Nov-23 | Mtm (%)     | Yoy (%)     | Pengaruh  |
| 1. ICP (US\$/brl)            | 79,63  | ▼ 8,2       | ▼ 9,0       | • PPh Migas<br>• PNPB SDA<br>• Subsidi dan Kompensasi<br>• Transfer ke Daerah |
| 2. HBA (US\$/T)              | 139,80 | ▲ 12,8      | ▼ 54,6      | • PNPB SDA<br>• Transfer ke Daerah  |
| 3. Harga CPO (US\$/MT)       | 750,54 | ▲ 1,3       | ▼ 9,8       | • Bea Keluar<br>• PNPB BLU  |

## PENDAPATAN NEGARA

"Kinerja Pendapatan Negara masih Tumbuh Positif Sampai Dengan November tahun 2023"

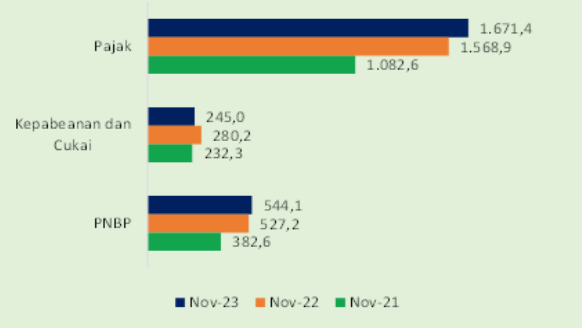
Sampai dengan 30 November 2023, pendapatan negara masih tumbuh positif meskipun mengalami normalisasi dengan pertumbuhan sebesar 3,6 persen (yoy) atau mencapai Rp2.462,2 triliun (93,4 persen terhadap Perpres 75 tahun 2023). Kinerja tersebut utamanya dikontribusikan dari penerimaan perpajakan dan PNBP. Kinerja penerimaan perpajakan tumbuh 3,6 persen dipengaruhi terutama oleh aktivitas produksi dan konsumsi, implementasi dampak kebijakan (UU HPP), serta masih terjaganya harga komoditas. Sementara itu, PNBP juga mampu meningkat sebesar 3,2 persen (yoy) dipengaruhi terutama PNBP SDA nonmigas dan setoran dividen BUMN. Di sisi lain, untuk realisasi hibah mencapai Rp1,8 triliun yang dikontribusikan baik dari hibah dalam negeri maupun hibah luar negeri.

Pendapatan Negara, 2021-2023 (Rp triliun)



Sumber: Kementerian Keuangan RI

Komponen Pendapatan Negara s.d November, 2021-2023 (Rp triliun)



### KINERJA PERPAJAKAN: PAJAK ON THE TRACK, KEPABEANAN DAN CUKAI MASIH TERKONTRAKSI

Sampai dengan 30 November 2023, penerimaan perpajakan telah mencapai Rp1.916,3 triliun. Capaian tersebut masih tumbuh positif sebesar 3,6 persen (yoy) didukung kinerja positif penerimaan pajak. Selama periode Januari hingga November 2023, penerimaan pajak mencapai Rp1.671,4 triliun atau 91,9 persen terhadap target Perpres 75 tahun 2023. Capaian penerimaan pajak tersebut masih tumbuh positif 6,5 persen (yoy) meskipun PPh 22 Impor, PPN Impor, serta PPh Final masih berkontraksi. Khusus bulan November 2023, PPN Dalam Negeri mengalami pertumbuhan yang sangat tinggi karena penurunan restitusi sektor perdagangan bahan bakar. Sementara itu, PPh Badan mengalami kontraksi karena adanya dinamisasi bulan November 2022 yang tidak berulang di November 2023. Selanjutnya, jika dilihat secara sektoral, seluruh sektor utama masih menunjukkan pertumbuhan positif. Pada bulan November 2023, sektor perdagangan meningkat tajam dipengaruhi penurunan restitusi. Sementara itu, sektor jasa keuangan dan asuransi serta sektor pertambangan berkontraksi karena adanya dinamisasi bulan November 2022 yang tidak berulang di November 2023.

Realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai sampai dengan 30 November 2023 telah mencapai Rp245,0 triliun atau 81,6 persen terhadap target Perpres 75 tahun 2023. Capaian tersebut berkontraksi sebesar 12,6 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya. Hal tersebut disebabkan oleh penurunan cukai dan bea keluar, meskipun bea masuk masih menunjukkan peningkatan meskipun sangat tipis. Penerimaan cukai sebagai komponen terbesar dari penerimaan Kepabeanan dan Cukai sampai akhir Oktober 2023 mampu mencapai Rp187,4 triliun atau 82,5 persen terhadap target Perpres 75 tahun 2023. Kinerja

cukai tersebut berkontraksi sebesar 4,2 persen yang disebabkan karena penurunan produksi hasil tembakau utamanya dari SKM dan SPM golongan I. Dari sisi Penerimaan bea masuk, kinerja positif masih berlanjut meskipun semakin termoderasi dengan mencapai Rp45,9 triliun atau 86,4 persen terhadap target Perpres 75 tahun 2023. Kinerja tersebut tumbuh 0,1 persen yang disebabkan oleh menguatnya nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap rupiah dan peningkatan tarif rata-rata bea masuk di tengah penurunan aktivitas impor. Dari sisi komoditas kontributor bea masuk terbesar yang menjadi pengungkit pertumbuhan adalah kendaraan roda empat, suku cadang kendaraan, dan mesin pertambangan. Sementara harga komoditas yang termoderasi terutama dari CPO berdampak pada bea keluar, sampai dengan 30 November 2023 berkontraksi 69,8 persen atau mencapai Rp11,7 triliun. Kinerja tersebut juga dipengaruhi penyesuaian tarif BK mineral seiring dengan progress hilirisasi SDA.

Berdasarkan realisasi sampai dengan 30 November 2023, kinerja perpajakan sampai dengan tahun 2023 akan dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut. Untuk komponen pajak, diperkirakan akan dapat mencapai target. Dalam pencapaian pajak, perlu diperhatikan beberapa hal sebagai berikut (1) nilai impor yang masih dalam tren menurun; (2) akselerasi realisasi belanja negara pada dua bulan terakhir; (3) penurunan angsuran PPh Badan. Untuk kepabeanan dan cukai, dalam mencapai target dipengaruhi beberapa faktor diantaranya pelaksanaan PMK 71/2003 tentang BK olahan mineral logam, harga CPO yang menurun, shifting produksi rokok yang menurun, serta belum dipungutnya objek cukai baru.

Secara rinci penerimaan perpajakan dan *forward looking* dapat dilihat pada link:

<https://bit.ly/DashboardperpajakanLenteraDesember2023>

## KINERJA PNBP S.D NOVEMBER 2023 DIDUKUNG OLEH PENDAPATAN KND

Realisasi PNBP sampai dengan 30 November 2023 mencapai Rp544,2 triliun atau 105,5 % dari Perpres 75 Tahun 2023, tumbuh 3,2 % (yoy). Kinerja positif ini terutama didorong oleh tingginya Pendapatan KND terutama dari setoran dividen BUMN.

Realisasi Pendapatan SDA Migas sampai dengan 30 November 2023 mencapai Rp109,0 triliun atau 105,2 % dari Perpres 75 Tahun 2023, berkontraksi 19,9 % (yoy). Penurunan ini terutama disebabkan oleh lebih rendahnya ICP dan lifting minyak bumi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Rata-rata ICP periode Januari - November 2023 mencapai US\$78,7/barel (2022: US\$98,9/barel). Sementara itu, pada periode Januari - Oktober 2023 rata-rata lifting minyak bumi mencapai 597,1 ribu barel/hari (2022: 607,4 ribu barel/hari) dan rata-rata lifting gas bumi mencapai sebesar 988,3 ribu barel/hari (2022: 951,4 ribu barel/hari).

Pendapatan SDA Nonmigas menunjukkan kinerja positif dengan realisasi sampai dengan 30 November 2023 mencapai Rp126,9 triliun atau 106,0 % dari Perpres 75 Tahun 2023, tumbuh sebesar 23,9 % (yoy). Kenaikan ini terutama didukung oleh Pendapatan SDA Pertambangan Minerba yang tumbuh 25,9 % (yoy) terutama disumbang oleh iuran produksi/royalti batubara dampak dari pemberlakuan PP Nomor 26 Tahun 2022 yang mengubah tarif maksimal royalti batubara dari 7,0 % menjadi 13,5 %. Realisasi Pendapatan SDA panas bumi juga mengalami pertumbuhan positif 29,4 % (yoy) disebabkan oleh kenaikan bagian pemerintah dari tambahan pendapatan atas penjualan listrik tahun 2022 yang sebelumnya tertunda karena adanya perbedaan penafsiran atas indeks eskalasi harga listrik. Sementara itu, realisasi Pendapatan SDA Kehutanan berkontraksi 1,4 % (yoy) antara lain disebabkan oleh lebih rendahnya pembayaran piutang PNBP dibandingkan tahun lalu. Realisasi Pendapatan SDA Perikanan juga mengalami kontraksi 51,7 % (yoy) antara lain disebabkan oleh belum optimalnya perubahan mekanisme pemungutan PNBP Perikanan dari Praproduksi menjadi Pascaproduksi.

Realisasi Pendapatan dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan (KND) sampai dengan 30 November 2023 mencapai sebesar Rp81,5 triliun

atau 100,0 % dari Perpres 75 Tahun 2023, tumbuh 100,9 % (yoy). Pertumbuhan tersebut terutama berasal dari setoran dividen BUMN Perbankan yang mencapai 50,1% dari total realisasi Pendapatan KND. Sementara itu, setoran dividen BUMN Nonperbankan berkontribusi sebesar 49,9% terutama berasal dari sektor energi, telekomunikasi, dan minerba.

Realisasi PNBP Lainnya sampai dengan 30 November 2023 mencapai Rp146,7 triliun atau 111,6 % dari Perpres 75 Tahun 2023, berkontraksi 15,3 % (yoy). Realisasi ini terdiri dari realisasi Pendapatan PNBP K/L yang tumbuh sebesar 8,1 % (yoy) antara lain berasal dari kenaikan pendapatan layanan administrasi hukum (Visa, Paspor, dll), pendapatan Kejaksaan dan Peradilan serta hasil Tipikor, serta Jasa Transportasi. Sementara itu, realisasi Pendapatan Penjualan Hasil Tambang (PHT) berkontraksi 40,8 % (yoy) dan realisasi Pendapatan DMO berkontraksi 73,5 % (yoy) yang disebabkan oleh tren penurunan harga komoditas terutama minyak bumi dan batubara.

Realisasi Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) sampai dengan 30 November 2023 mencapai Rp80,1 triliun atau 100,8% dari Perpres 75 Tahun 2023, tumbuh 6,8% (yoy). Pertumbuhan ini terutama berasal dari kenaikan Pendapatan BLU Non Sawit dari Jasa Pelayanan Rumah Sakit dan Pendapatan Jasa Pengelolaan Dana BLU antara lain pada satker BLU di Kemenkeu (LMAN, BDPKS, PIP, dst). Sementara itu, Pendapatan Pengelolaan Dana Perkebunan Sawit mengalami penurunan akibat tren penurunan harga CPO dampak dari penurunan *demand* dikarenakan telah pulihnya *supply* minyak nabati.

Berdasarkan kinerja PNBP sampai dengan bulan November tahun 2023, diperkirakan sampai akhir tahun 2023 terdapat potensi tambahan realisasi PNBP dibandingkan target Perpres 75 Tahun 2023, terutama berasal dari Pendapatan SDA Nonmigas sektor minerba dan tambahan setoran Pendapatan KND. Namun, masih terdapat tantangan dalam pencapaian target tersebut antara lain volatilitas perekonomian terutama harga komoditas energi serta perubahan kebijakan Pemerintah yang berdampak pada realisasi PNBP. Beberapa kebijakan yang akan diambil dalam rangka mengoptimalkan pencapaian target antara lain dilakukan melalui penguatan pengawasan atas pengelolaan PNBP, implementasi ABS untuk piutang PNBP SDA dan PNBP pada KL lainnya, serta pengembangan SIMBARA untuk bauksit dan nikel serta integrasi data dengan Kementerian Perindustrian.

### BELANJA NEGARA

Realisasi Belanja Negara s.d. November tahun 2023 mencapai Rp2.510,5 triliun (80,5% dari Pagu Perpres tahun 2023 sebesar Rp3.117,2 triliun) atau turun sebesar 4,0% dibandingkan realisasinya pada periode yang sama di tahun 2022. Realisasi Belanja Negara tersebut terdiri atas realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.774,4 triliun (77,1% dari Pagu Perpres 2023) dan Transfer ke Daerah sebesar Rp736,1 triliun (90,4% dari Pagu Perpres tahun 2023).

### BELANJA PEMERINTAH PUSAT UNTUK MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DENGAN PEMANFAATAN ANTARA LAIN PROGRAM PERLINSOS, PENDIDIKAN, INFRASTRUKTUR, KESEHATAN, SERTA PERTAHANAN DAN KEAMANAN

Realisasi Belanja Negara s.d. November tahun 2023 mencapai Rp2.510,5 triliun (80,5% dari Pagu Perpres tahun 2023 sebesar Rp3.117,2 triliun) atau turun sebesar 4,0% dibandingkan realisasinya pada periode yang sama di tahun 2022. Realisasi Belanja Negara tersebut terdiri atas realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.774,4 triliun (77,1% dari Pagu Perpres 2023) dan Transfer ke Daerah sebesar Rp736,1 triliun (90,4% dari Pagu Perpres tahun 2023).

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.774,4 triliun tersebut terdiri dari realisasi belanja K/L dan belanja non-K/L. Realisasi belanja K/L mencapai sebesar Rp890,2 triliun (88,9% dari Pagu Perpres tahun 2023), lebih tinggi 1,4% dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun 2022 sebesar Rp877,8 triliun. Belanja K/L tersebut dimanfaatkan antara lain untuk: penyaluran berbagai program perlindungan sosial a.l. PKH, Kartu Sembako, Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN, PIP, BOS, dan KIP Kuliah, dan bantuan bencana; dukungan persiapan pelaksanaan Pemilu; pelaksanaan pembangunan IKN.

Selanjutnya, realisasi belanja non-K/L sebesar Rp884,3 triliun (67,9% dari Pagu Perpres tahun 2023), turun 12,0% dibandingkan dengan realisasinya pada periode yang sama tahun 2022 sebesar Rp1.004,4 triliun. Belanja non-K/L tersebut dimanfaatkan antara lain untuk penyaluran manfaat pensiun, pembayaran bunga utang, penyaluran subsidi, serta pembayaran kompensasi. Penurunan tersebut karena pada tahun 2022 Pemerintah melakukan pembayaran kewajiban atas kompensasi pada tahun 2019 sampai dengan 2021

Kinerja realisasi belanja K/L s.d. November tahun 2023 terutama disumbangkan oleh tingginya realisasi belanja modal sebesar 23,6% terhadap realisasinya tahun lalu. Di samping itu, realisasi Belanja Pegawai s.d. November tahun 2023 juga tumbuh sebesar 2,1% terhadap realisasi pada periode yang sama tahun 2022. Adapun penjelasan kinerja belanja K/L menurut jenis belanja dapat disampaikan sebagai berikut.

Realisasi belanja pegawai K/L mencapai sebesar Rp234,9 triliun (86,1% dari Pagu Perpres tahun 2023), meningkat 2,1% dari realisasinya tahun lalu. Realisasi belanja pegawai tersebut terdiri atas komponen gaji dan tunjangan sebesar Rp157,8 triliun dan komponen tunjangan kinerja, honorarium, lembur, dan lainnya. sebesar Rp77,1 triliun. Realisasi belanja pegawai tersebut termasuk untuk penyaluran THR dan gaji-13 pada bulan April dan Juni tahun 2023.

Kemudian, **realisasi belanja barang K/L mencapai Rp324,2 triliun (86,7% dari Pagu Perpres tahun 2023), lebih rendah 5,1% dari periode yang sama pada tahun 2022**, utamanya dipengaruhi pengelolaan dana kelapa sawit dan pembayaran klaim perawatan pasien Covid-19 pada tahun 2022 yang relatif besar. Realisasi belanja barang tersebut dimanfaatkan antara lain untuk: (1) pemeliharaan/perawatan BMN pada Kemenhan dalam rangka mendukung alutsista pada Matra Darat, Matra Laut, Matra Udara dan Umum Integratif; (2) pemeliharaan/perawatan sarana prasarana sumber daya air, penyediaan akses rumah layak huni, penanggulangan darurat akibat bencana, dan preservasi jalan nasional pada KemenPUPR; (3) pengadaan/dukungan logistik dan pelayanan kesehatan pada POLRI, (4) penyaluran dana BOS pada Kemenag; dan (5) pembentukan Badan *Ad hoc* dalam rangka kegiatan tahapan Pemilu 2024 pada KPU.

Selanjutnya, **realisasi belanja modal mencapai Rp189,2 triliun (89,9% dari Pagu Perpres tahun 2023), tumbuh sebesar 23,6% apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2022**. Kinerja realisasi Belanja Modal tersebut dipengaruhi antara lain oleh: (1) belanja modal belanja peralatan dan mesin antara lain pengadaan alat material khusus (almatus) oleh POLRI, pengadaan alat utama sistem senjata TNI (alutsista) pada Kemenhan, dan pengadaan peralatan intelijen pada Kejaksaan dan BIN; (2) belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan dengan pemanfaatan antara lain untuk pembangunan bendungan, jaringan irigasi, preservasi jalan dan jembatan oleh PUPR, serta pembangunan prasarana perkeretaapian, fasilitas bandar udara dan pelabuhan oleh Kemenhub; (3) belanja modal gedung dan bangunan dengan pemanfaatan antara lain pembangunan gedung kantor pemerintahan Kawasan IKN oleh KemenPUPR, terminal bandara oleh Kemenhub, gedung perkuliahan pendidikan tinggi oleh Kemendikbudristek, rumah sakit oleh Kementerian Kesehatan, dan rusun prajurit TNI & Polri.

**Realisasi bantuan sosial mencapai 141,9 triliun (98,9% dari Pagu Perpres tahun 2023) atau berkontraksi 7,4% (yoy)** yang dipengaruhi adanya penebalan bantuan sosial berupa penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Minyak Goreng (Migor) dan BLT BBM pada tahun 2022 namun tidak berlanjut ke tahun 2023. Belanja bantuan sosial dimanfaatkan antara lain untuk: (1) penyaluran bantuan sosial pada Kemensos sebesar Rp73,4 triliun a.l. untuk PKH bagi 9,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), penyaluran program kartu sembako untuk 18,7 juta KPM; (2) penyaluran bantuan sosial pada Kemenkes sebesar Rp42,4 triliun untuk pembayaran bantuan iuran kepada 96,7 juta PBI JKN; (3) penyaluran bantuan PIP bagi 20,3 juta siswa dan bantuan KIP Kuliah bagi 949,2 ribu mahasiswa dengan total realisasi sebesar Rp21,2 triliun pada Kemendikbudristek dan sebesar Rp2,5 triliun pada Kemenag; serta (4) bantuan penanggulangan bencana pada BNPB sebesar Rp2,4 triliun yang dimanfaatkan antara lain untuk bantuan stimulan rumah kepada 42,4 ribu KK terdampak bencana Kabupaten Cianjur.

**Realisasi belanja non-K/L s.d. November tahun 2023 terutama disumbangkan oleh pembayaran di bunga utang, pembayaran pensiun, serta penyaluran subsidi**. Pembayaran manfaat pensiun sebesar Rp138,0 triliun, meningkat

sebesar 4,8% terhadap realisasinya tahun lalu sebesar Rp131,7 triliun disumbangkan oleh meningkatnya jumlah penerima pensiun PNS daerah menjadi kurang lebih 2,1 juta orang. Realisasi pembayaran bunga utang sebesar Rp409,3 triliun (92,7% dari Pagu Perpres tahun 2023) atau meningkat 12,8% terhadap realisasinya tahun lalu. Kemudian, realisasi belanja Subsidi mencapai Rp202,3 triliun (67,8% dari Pagu Perpres tahun 2023), atau lebih rendah 1,8% dibandingkan realisasinya di periode yang sama tahun lalu. Realisasi tersebut terdiri atas: (a) subsidi energi sebesar Rp134,4 triliun, mencakup subsidi BBM sebesar Rp18,1 triliun untuk penyaluran BBM bersubsidi sebesar 14,9 juta KL, LPG tabung 3 Kg sebesar Rp60,1 triliun untuk penyaluran 6,7 juta MT, dan subsidi listrik sebesar Rp56,2 triliun untuk 39,7 juta pelanggan; dan (b) subsidi non energi sebesar Rp67,9 triliun, a.l. untuk penyaluran pupuk bersubsidi sebesar 5,7 juta ton, Subsidi Bunga KUR diberikan kepada 4,1 juta debitur dengan total penyaluran KUR sebesar Rp228,9 triliun, dan Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan untuk 207,3 ribu unit rumah. Selain itu, realisasi belanja non K/L juga dimanfaatkan untuk pembayaran kompensasi BBM sebesar Rp81,5 triliun dan pembayaran kompensasi listrik sebesar Rp35,2 triliun, serta pelaksanaan program Kartu Prakerja sebesar Rp3,7 triliun bagi 1,0 juta peserta pelatihan.

Memperhatikan kinerja Belanja Pemerintah Pusat s.d November, **Pemerintah perlu menjaga dan mendorong kinerja belanja Pemerintah Pusat, terutama melalui belanja K/L agar dampaknya dapat segera dirasakan masyarakat**. Pemerintah tetap menjaga komitmen membangun IKN. Sampai dengan 30 November tahun 2023 telah direalisasikan dukungan anggaran sebesar Rp15,6 triliun untuk: (1) pembangunan cluster infrastruktur sebesar Rp13,2 triliun antara lain untuk pembangunan istana negara dan kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP), pembangunan tower rusun ASN dan hankam, pembangunan jalan tol IKN, dan pembangunan bendungan Sepaku Semoi; dan (2) klaster non infrastruktur sebesar Rp2,5 triliun antara lain untuk dukungan pengamanan pembangunan IKN, penyelesaian pelepasan kawasan hutan untuk IKN, penataan dan pengelolaan BMN, serta operasional Otorita IKN.

**REALISASI PENYALURAN TKD DIMANFAATKAN ANTARA LAIN UNTUK Mendukung Peningkatan Layanan Publik di Daerah Bidang Layanan Umum, Pendidikan, Kesehatan, dan Pekerjaan Umum, Serta Mendukung Pencapaian Pembangunan dan Prioritas Nasional di Daerah**

**Realisasi penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) sampai dengan 30 November 2023 mencapai Rp736,1 triliun atau 90,4 persen dari pagu APBN tahun 2023**, secara nominal lebih tinggi dibandingkan realisasinya pada tahun 2022 sebesar Rp731,7 triliun (90,9 persen). Hal ini terutama dipengaruhi oleh kinerja pemerintah daerah dalam memenuhi persyaratan penyaluran anggaran TKD.

**Penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) sampai dengan 30 November 2023 telah terealisasi sebesar Rp118,2 triliun atau 86,7 persen dari pagu**. Realisasi tersebut menunjukkan peningkatan sebesar 0,4 persen (yoy).

Realisasi penyaluran DBH tersebut meliputi realisasi DBH Pajak sebesar Rp49,7 triliun, realisasi DBH Sumber Daya Alam (SDA) sebesar Rp68,2 triliun, dan realisasi DBH Perkebunan Sawit sebesar Rp339,9 miliar.

Selanjutnya, **realisasi penyaluran DAU sampai dengan 30 November 2023 mencapai Rp370,8 triliun atau 93,6 persen dari pagu, secara nominal lebih tinggi dibandingkan** realisasi tahun 2022 sebesar Rp369,0 triliun (97,6 persen) terutama dipengaruhi oleh kecepatan pemerintah daerah dalam memenuhi syarat penyaluran DAU yang Ditentukan Penggunaannya secara lengkap. Penyaluran DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya dilakukan setiap bulan sebesar 1/12 dari pagu, dan penyaluran DAU yang Ditentukan Penggunaannya yaitu: (1) DAU penggajian formasi PPPK dilakukan setiap bulan sesuai laporan pengangkatan dan pembayaran gaji PPPK yang diangkat di tahun 2023; (2) DAU pendanaan kelurahan disalurkan dua tahap; serta (3) DAU bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan bidang pekerjaan umum disalurkan tiga tahap. Penyaluran DAU yang Ditentukan Penggunaannya dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q DJPK menerima laporan syarat penyaluran berupa laporan rencana anggaran dan laporan realisasi masing-masing jenis DAU yang Ditentukan Penggunaannya.

Mulai tahun 2023 DAK terdiri atas: (1) DAK Fisik, (2) DAK Nonfisik, dan (3) Hibah kepada Daerah. **Sampai dengan 30 November 2023, realisasi penyaluran DAK Fisik mencapai Rp39,3 triliun atau 73,7 persen dari pagu**, secara nominal lebih rendah namun secara persentase lebih tinggi dibandingkan penyaluran tahun 2022 sebesar Rp42,5 triliun (69,8 persen). Hal tersebut terutama dipengaruhi oleh kecepatan penyelesaian kontrak pekerjaan pada beberapa bidang DAK Fisik di daerah.

Sementara itu, **DAK Nonfisik telah tersalurkan sebesar Rp116,3 triliun atau 89,3 persen dari pagu**, lebih tinggi dibandingkan realisasinya pada periode yang sama tahun 2022 sebesar Rp111,9 triliun (86,9 persen). Realisasi DAK Nonfisik utamanya dipengaruhi oleh kinerja penyampaian syarat salur dari pemerintah daerah dan rekomendasi penyaluran dana dari masing-masing K/L pengampu DAK Nonfisik.

**Hibah kepada Daerah sampai dengan 30 November 2023 telah tersalurkan sebesar Rp1,7 triliun atau 83,0 persen dari pagu APBN tahun 2023**. Hibah kepada Daerah tahun 2023 diarahkan untuk mendukung penyediaan layanan dasar umum pada bidang perhubungan, pembangunan sarana air minum, pengelolaan sanitasi, irigasi, pertanian, lingkungan hidup, dan jalan daerah.

**Dana Otonomi Khusus dan DTI Otsus sampai dengan tanggal 30 November 2023 telah tersalurkan sebesar Rp17,2 triliun atau 100,0 persen dari pagu** yang terdiri atas: (i) Dana Otsus Aceh sebesar Rp3,96 triliun atau 100,0 persen dari pagu; serta (ii) Dana Otsus dan DTI Provinsi-Provinsi di wilayah Papua sebesar Rp13,3 triliun atau 100,0 persen dari pagu yang ditujukan bagi Provinsi Papua, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Papua Barat Daya.

Selanjutnya, Dana Keistimewaan D.I.Y telah terealisasi sebesar Rp1,4 triliun atau 96,7 persen dari pagu, sedikit lebih rendah dibandingkan dengan realisasinya pada tahun 2022 sebesar Rp1,3 triliun (100,0 persen). Realisasi tersebut utamanya dipengaruhi oleh kecepatan dan kepatuhan pemerintah daerah dalam memenuhi dokumen persyaratan penyaluran. Dana Keistimewaan D.I.Y digunakan untuk mendukung penyelenggaraan kewenangan keistimewaan yang meliputi: (i) tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang gubernur dan wakil gubernur; (ii) kelembagaan; (iii) kebudayaan; (iv) pertanahan; dan (v) tata ruang.

Sampai dengan 30 November 2023, realisasi penyaluran Dana Desa mencapai Rp65,2 triliun atau 93,1 persen dari pagu, realisasi tersebut lebih tinggi dibandingkan realisasinya pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp63,3 triliun (93,1 persen). Selanjutnya, penyaluran BLT Desa dengan pagu sebesar Rp10,4 triliun untuk 2,9 juta KPM sampai dengan 30 November 2023 telah tersalurkan sebesar Rp9,6 triliun dengan sasaran sebanyak 2,9 juta KPM (99,98 persen dari target KPM penerima BLT Desa). Berdasarkan PMK Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan

Dana Desa, untuk penyaluran Dana Desa terdiri atas: (a) penyaluran Dana Desa nonBLT Desa dilakukan melalui tiga tahap yaitu tahap I sebesar 40% paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni, tahap II sebesar 40% paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Agustus, serta tahap III sebesar 20% paling cepat bulan Juni; dan (b) penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa dilakukan secara triwulanan setelah persyaratan penyaluran disampaikan secara lengkap.

Insentif Fiskal merupakan nomenklatur baru dari Dana Insentif Daerah (DID) yang mulai digunakan dalam APBN tahun 2023. Pemerintah mengalokasikan Insentif Fiskal sebagai instrumen penghargaan yang diberikan bagi daerah yang berkinerja baik dalam tata kelola keuangan daerah, pelayanan dasar publik, dan pelayanan umum pemerintahan. Sampai dengan 30 November 2023 realisasi penyaluran Insentif Fiskal mencapai Rp6,0 triliun atau 75,0 persen dari pagu, secara nominal lebih tinggi dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp5,5 triliun (78,5 persen). Penggunaan Insentif Fiskal tahun 2023 diarahkan antara lain untuk percepatan pemulihan ekonomi di daerah dan dukungan dunia usaha serta penciptaan lapangan kerja.

### PEMBIAYAAN ANGGARAN S.D 30 NOVEMBER

Realisasi pembiayaan anggaran sampai dengan 30 November 2023 sebesar Rp282,3 triliun atau 58,8 persen dari target pembiayaan anggaran tahun 2023 dalam Perpres 75/2023 sebesar Rp479,9 triliun. Realisasi pembiayaan anggaran tersebut lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2022 sebesar Rp442,4 triliun atau 52,6 persen dari targetnya dalam Perpres 98 tahun 2022. Hal ini sejalan dengan kebijakan pembiayaan utang yang fleksibel dan *prudent* serta memperhatikan kondisi kas keuangan negara.

Pembiayaan utang secara neto terealisasi sebesar Rp332,4 triliun atau 78,9 persen dari targetnya dalam Perpres 75/2023 sebesar Rp421,2 triliun. Realisasi pembiayaan utang tersebut lebih rendah dari periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp512,6 triliun atau 54,3 persen dari pagu alokasi Perpres 98 tahun 2022. Realisasi pembiayaan utang tersebut disumbangkan oleh penurunan penerbitan SBN (neto) sejalan dengan kebijakan Pemerintah dalam pengelolaan kas agar semakin efisien serta mempertimbangkan dinamika pasar keuangan saat ini yang memberikan tekanan terhadap pembiayaan utang Pemerintah.

Selanjutnya, Pemerintah juga melaksanakan fleksibilitas komposisi pinjaman sejalan dengan perkembangan perekonomian dan pasar keuangan sehingga risiko dapat tetap dijaga pada level yang *manageable*. Pinjaman Dalam Negeri (PDN) neto terealisasi sebesar Rp8,4 triliun yang berasal dari penarikan PDN sebesar Rp11,2 triliun (320,8 persen terhadap pagunya dalam Perpres 75/2023) dan pembayaran cicilan pokok PDN sebesar negatif Rp2,8 triliun (102,7 persen terhadap pagunya dalam Perpres 75/2023). Sementara pada pinjaman luar negeri neto terealisasi sebesar Rp31,5 triliun, yang berasal dari penarikan pinjaman Rp105,4 triliun (169,9 persen terhadap pagunya dalam Perpres 75/2023) dan pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri sebesar negatif Rp73,9 triliun (93,1 persen terhadap pagunya dalam Perpres 75/2023). Penarikan pinjaman luar negeri tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp74,4 triliun. Kenaikan tersebut utamanya disumbangkan oleh penarikan pinjaman tunai yang melebihi pagunya (196,7 persen dari pagunya dalam Perpres 75/2023). Selanjutnya, realisasi pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri lebih tinggi dari realisasinya pada periode yang sama tahun 2022 sebesar negatif Rp70,1 triliun, dikarenakan lebih besarnya jatuh tempo pinjaman dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

Pemberian pinjaman (neto) terealisasi sebesar Rp3,1 triliun atau 58,9 persen terhadap pagunya yang berasal dari realisasi penerusan pinjaman sebesar negatif Rp0,9 triliun (83,5 persen dari pagu dalam Perpres 75/2023) dan realisasi penerimaan cicilan pokok penerusan pinjaman sebesar Rp4,0 triliun (63,1 persen terhadap pagunya dalam Perpres 75/2023).

Sementara itu, realisasi pembiayaan investasi neto sebesar negatif Rp53,3 triliun, terdiri atas Investasi pada program FLPP sebesar negatif Rp19,5 triliun, Investasi lembaga LPDP sebesar negatif Rp15 triliun, investasi kepada lembaga LMAN sebesar negatif Rp25,4 triliun dan investasi kepada lembaga LDKPI sebesar negatif Rp2 triliun serta investasi kepada organisasi/LKI/BU internasional sebesar negatif 1,6 triliun. Di sisi lain, terdapat penerimaan kembali investasi sebesar Rp15,2 triliun yang terdiri atas penerimaan kembali investasi dari BPJT sebesar Rp148,5 miliar dan penerimaan cicilan pokok investasi sebesar Rp10,4 triliun.

Anggaran Kewajiban Penjaminan Tahun 2023 telah direalisasikan sepenuhnya pada bulan November 2023. Dengan dilakukan pemindahbukuan ke dalam rekening dana cadangan penjaminan pemerintah sebesar Rp0,3 triliun, yang terdiri atas alokasi untuk penugasan percepatan pembangunan infrastruktur nasional sebesar Rp0,3 triliun dan alokasi untuk penugasan penyediaan pembiayaan infrastruktur daerah kepada BUMN sebesar Rp0,03 triliun. Adapun total saldo rekening penjaminan pemerintah tersebut saat ini adalah sebesar Rp12,2 triliun yang terdiri atas saldo Rekening Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah sebesar Rp11,8 triliun dan saldo Rekening Dana Jaminan Penugasan Pembiayaan Infrastruktur Daerah sebesar Rp0,4 triliun, yang berasal dari pemindahbukuan anggaran kewajiban penjaminan tahun-tahun sebelumnya, untuk memitigasi risiko klaim atas jaminan Pemerintah.

#### REDAKSI

Direktorat Penyusunan APBN  
Gedung Sutikno Slamet Lt. 13  
Jl. DR Wahidin No. 1  
Jakarta Pusat  
Telp: (021) 3849315  
Email:  
penyusunan.apbn@gmail.com

Terbatas untuk  
internal DJA

